

Systematic Literature Review (SLR): Memikirkan Kembali Prinsip-Prinsip Konstitusional Atas Perdebatan dan Reformasi

Aida Syahfitri¹ , Usiono²

^{1,2} Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aida0601232036@uinsu.ac.id¹, usiono@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini merupakan Systematic Literature Review (SLR) yang membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi dan reformasi konstitusi di Indonesia. Melalui analisis data dari berbagai sumber literatur, penelitian ini menyoroti peran penting Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, serta membentuk tata negara yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi sistem hukum negara dari masa Orde Baru ke era Reformasi mencerminkan peran yang semakin diperkuat dari Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Studi literatur sistematis (SLR) menjadi penting dalam memahami isu-isu konstitusi dan memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi kebijakan di masa depan.

Keywords: *Konstitusi, Reformasi, Demokrasi*

Abstract

This research is a systematic literature review (SLR) that discusses the role of the Constitutional Court in safeguarding democracy and constitutional reform in Indonesia. Through data analysis of various literature sources, this research highlights the important role of the Constitutional Court in safeguarding local democracy, upholding the principles of democracy and the rule of law, and shaping democratic governance. The findings show that the evolution of the country's legal system from the New Order to the Reform Era reflects the strengthened role of the Constitutional Court in maintaining the balance of power and protecting human rights. The systematic literature review (SLR) is important for understanding constitutional issues and provides a solid foundation for future policy recommendations.

Keywords: *Constitution, Reform, Democracy*

PENDAHULUAN

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995: 16). Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar atau norma dasar (hukum dasar) mempunyai arti penting bagi sebuah bangsa yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*). Menurut para pakar hukum, konsep tentang Negara hukum sejak zaman Plato dan Aristoteles sudah ada. Sejatinya hukum yang diharapkan ialah hukum yang dapat memberikan bukan hanya kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat, dan di sinilah dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan dan reformasi telah menjadi topik yang sangat relevan dalam diskusi akademis dan praktis, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami perubahan politik dan sosial. Dalam konteks ini, tinjauan literatur sistematis (SLR) dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi karya-karya yang berkaitan dengan perdebatan dan reformasi. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi topik yang relevan, membandingkan temuan penelitian, dan mengevaluasi dampak dari temuan tersebut. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis mengenai perdebatan dan reformasi, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan institusi politik yang lebih demokratis dan transparan.

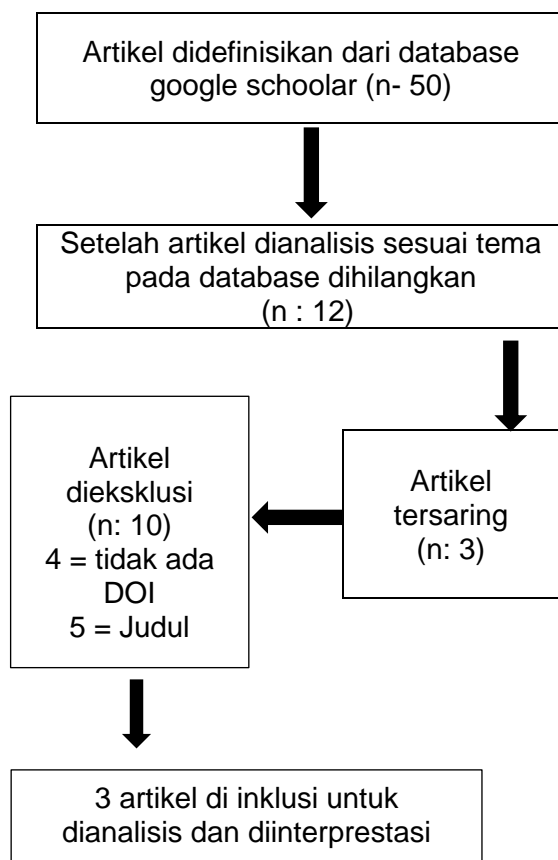
METODE

Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu *Systematic Review* (SR) atau secara umum disebut *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan sebuah Teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintegrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti. Tinjauan sistematis adalah metode meninjau suatu masalah tertentu dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih masalah tertentu dan mengajukan pertanyaan yang diselesaikan dengan jelas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengikuti penelitian sebelumnya yang berkualitas baik dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan praktisi yang bertujuan untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi semua penelitian ditetapkan penelitian ini terdiri beberapa tahapan di antaranya:

Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mengawal konstitusi? Kedua Populasi data dalam penelitian ini adalah jurnal yang berfokus pada fungsi, peran dan dampak lembaga peradilan konstitusional. Pencarian study literatur dimulai dengan menggunakan data yang terdapat, pada *google scholar* yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi *publish or perish*. Kata kunci yang digunakan adalah perlindungan serta peran konstitusi dalam menjaga demokrasi dengan membatasi artikel dari tahun 2020 sampai 2024.

Ketiga setelah mendapatkan berbagai artikel. Peneliti mendapatkan 50 artikel yang berhubungan dengan tema Mahkamah Konstitusi pada pencarian Data base *Google Scholar*, lalu memilih 12 artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti dari beberapa artikel. Kemudian mempelajari artikel tersebut secara mendetail dan yang sesuai dengan materi Mahkamah Konstitusi, pada 12 artikel di inklusi dan diteliti secara mendetail menjadi 3 artikel yang sesuai dengan tema pembahasan, lalu 38 tidak mencakup dalam pembahasan atau pencarian. 3 artikel didapatkan terutama selaras dengan tema yang diteliti yang akan disajikan pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Berikut diagram alur proses eksklusi dan inklusi pada tahap *Systematic Review* (n: jumlah artikel)



Gambar 1. Diagram Alir Terkait Langkah Systematic Literature Review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam sintesis hasil, peneliti menemukan bahwa tema-tema yang terkait dengan perdebatan dan reformasi meliputi aspek-aspek seperti kepentingan masyarakat, keadilan, dan transparansi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perdebatan dan reformasi memerlukan adanya kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang pentingnya pengembangan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan.

Tabel 1. Hasil Penelitian terhadap Peradilan Konstitusi dalam menjaga Demokrasi

Peneliti dan Tahun Penelitian	Jurnal	Hasil Penelitian
Sigit Wicaksono, Pandu Arief Hidayat	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Lokal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam mengawal demokrasi lokal melalui pola putusan yang beragam. Melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala daerah, serta mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan proses demokratis dalam pemilihan umum kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang dapat menjaga kualitas demokrasi lokal melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya.
Adhitya Kartika, Widya, 2021	Jurnal Pro Hukum : Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum dan Demokrasi	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi dan negara hukum melalui penanganan sengketa pemilihan umum. MKRI berperan sebagai <i>the Guardian of Constitution</i> dalam menjaga hak rakyat, menjaga demokrasi berkeadilan, serta menjalankan fungsi sebagai pelindung HAM dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis isu hukum terkait dengan demokrasi dan pemilihan umum. Dengan ini, MKRI memiliki peran yang krusial dalam

			menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan menjaga kepatuhan terhadap konstitusi untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan integritas demokrasi di Indonesia.
Suhaiy Aslamiyah Zainal Pakpahan, 2024	Batul Nst, Abidin	Jurnal on education : Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis	Hasil Penelitian menyatakan bahwa konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan sistem tata negara, melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Konstitusi juga harus dapat menghadapi tantangan zaman seperti teknologi informasi, perlindungan data pribadi, globalisasi ekonomi, perubahan iklim, keamanan siber, dan integrasi teknologi dalam pelayanan publik dengan konsensus, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan dan adaptasi, serta kerja sama internasional. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan prinsip hukum dalam negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mungkin mencakup analisis konstitusi, studi kasus, tinjauan literatur, wawancara dengan pakar hukum konstitusi, dan analisis perbandingan konstitusi dari berbagai negara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konstitusi dalam memastikan keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam pemerintahan.

Pembahasan

Perubahan konstitusi pada proses transisi politik di Indonesia yang merupakan salah satu agenda dari era reformasi ditandai dengan amandemen pertama hingga keempat terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi era transisi politik, sebuah negara demokrasi akan dihadapkan pada problematika besar terkait dengan arah strategi pembangunan hukum. Strategi pembangunan hukum dapat dibangun ketika problematika terkait hubungan produk hukum dari rezim yang lama dan baru dapat diselesaikan secara teknis. Hal ini telah dibahas dan dipecahkan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia hanya perlu membuat, mengganti atau memperbaiki aturan-aturan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan melalui demokrasi.

Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan kewenangan meninjau undang-undang, menyelesaikan sengketa pemilu, dan menjamin dihormatinya prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kualitas dan integritas demokrasi Indonesia. Konstitusi sendiri merupakan landasan penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan beradaptasi terhadap tantangan kontemporer, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga utama prinsip-prinsip tersebut.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia. Perubahan konstitusi dari masa Orde Baru ke era Reformasi juga menunjukkan evolusi sistem hukum negara menuju demokrasi substantif. Penegakan hukum progresif juga menjadi kunci dalam mencapai demokrasi yang sejati dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan peran Mahkamah Konstitusi dan memperkuat sistem hukum Indonesia, diperlukan penelitian lanjutan yang mendalam mengenai perdebatan dan reformasi konstitusi. Pentingnya studi literatur sistematis (SLR) dalam memahami isu-isu konstitusi juga harus terus ditekankan. Selain itu, perlunya upaya untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan secara konsisten untuk membangun tata negara yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia* (Tarmizi (ed.)). sinar grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=UML8gRRAzy&dq=konstitusi&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=konstitusi&f=false>
- Batul, S., & Nst, A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 06(02), 11760–11769.
- Jadidah, F. (2020). *Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia*. 6(1), 149–161.
- Kartika, A. W. (2022). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10–22.
<https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Nainggolan, I. L., & Setyawanta, L. T. (2015). Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP. *Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, 8, 34–57.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat” dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 60–72.

- <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Tourinho, M. (2021). The Co-Constitution of Order. *International Organization*, 75(2), 258–281. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000466>